

PERGESERAN PERAN IDEOLOGI DALAM PARTAI POLITIK

Salie, Dwi Winurti

Abstrak

Pada masa reformasi sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar, khususnya kemunculan partai politik. Perubahan yang terjadi pada asas tunggal partai politik menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi. Dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung konstitusi pada pemerintah daerah ataupun pusat dapat memiliki warna dalam politik. Sehingga, para calon tidak dapat memiliki peluang besar untuk dapat bergabung di dalam partai dan tidak dapat memiliki peluang besar mendapatkan suara mutlak dan hal tersebut berdampak pada partai politik tidak dapat memperoleh kekuasaan. Pada halnya koalisi di antara partai dengan ideologi yang berbeda akan mendapatkan keuntungan kekuasaan. Kesimpulan dari tulisan anggota atau calon menjadi permainan kegiatan politik karena partai memperdagangkan tokoh dari pada mememtingkan kinerja tokoh tersebut dari pada digunakan sebagai daya tarik.

Kata kunci: Ideologi, Partai politik

Abstract

During the reformation period, the Indonesian political system underwent major changes, especially the emergence of political parties. Changes that occur in the single principle of political parties make Pancasila the basis of ideology. With the direct election of the constitutional to the regional or central government, it can have color in politics. Thus, the candidates cannot have a great change of being able to join the party and cannot have a great change of getting an absolute vote and this has an impact on the political party being unable to gain power. In the case of coalitions between parties with different ideologies will gain power. The conclusion from the writings of members or candidates becomes a game of political activity because parties trade figures rather than focusing on the performance of these figures rather than being used as attractions.

Keyword: Ideology, Politic Parties

Pendahuluan

Perpolitikan Indonesia beranjak berkembang lagi disaat pasca Reformasi, dahulu partai politik yang dianggap tidak mampu atau tidak berkembang didepan para aktor penguasa pada saat itu mulai menunjukkan power untuk mengontrol jalannya sebuah kekuasaan. Keinginan seperti itu pada awal kemerdekaan pernah muncul yang berawal dari revolusi yang sangat panjang dalam sebuah negara untuk melawan perlakuan kolonial. Nuansa kebahagiaan akibat kebebasan berpolitik pada awal itu dapat tergambarkan dengan munculnya bebagai macam partai politik

dengan berbagai latar belakang. Pada saat itu banyak kelompok yang menganggap pemilu pertama adalah pemilu yang paling demokratis, dikarenakan calon peserta pemilu dan asas jujur, adil masih dapat di pertanggungjawabkan dikarenakan pada saat itu para tokoh penguasa belum memiliki kunci kekuasaan untuk mempengaruhi lajunya demokrasi, dan berbanding terbalik dengan masa saat ini dan menjadi persoalan pelaksanaan pemilu dapat dengan mudah dicampur tangani oleh para penguasa untuk mengatur perolehan suara dalam pemilihan umum. Segala macam cara dilakukan contohnya politik uang, mobilitas memilih partai penguasa, data yang bisa dimanipulasi serta menyuap penyelenggara pemilu untuk memenangkan calon yang mereka usung. Yang menjadi persoalan pertama didalam partai Demokrasi Indonesia adalah yang sangat jelas.

Karena didalam partai tidak bisa lepas dari konflik yang berulang, konflik yang ditimbulkan adalah sebuah manipulasi pemerintah untuk menciptakan kelemahan suatu partai demi mendapatkan keinginan untuk mengakomodir pemerintahan Soeharto. Konflik internal pada saat itu sering terjadi pada saat kepemimpinan Sanusi Hardjadinata, berlanjut dalam kepemimpinan Hardjanto, hingga pada kepengurusan Suryadi. Terlepas dari itu kekuasaan pada masa orde parpol dapat menemukan kehidupannya dalam politik. Banyak ruang yang luas telah diberikan melalui undang-undang dalam membuat parpol dapat dalam kondisi pada awal kemerdekaan dimana banyaknya antusias masyarakat dalam partisipasi politik. Berlakunya asas tunggal pancasila sebagai ideologi membuat setiap individu bebas berpendapat dan setiap manusia boleh mengungkapkan pendapatnya dalam segala hal dan masyarakat dapat bermimpi tentang memiliki sistem demokrasi yang ideal.

Ideologi

Menurut Ali Syariati ideologi didefinisikan sebagai ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Menurut Streger ideologi sebagai suatu sistem sebaran ide, kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma serta peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. Menurut Lane ideologi dicirikan oleh ideologi politik berkaitan dengan pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin? Ini berkaitan dengan seperti apa pemimpin yang layak untuk memimpin masyarakat luas, apakah yang menjadi bentuk pertimbangan agama, sosial, harta kekayaan, akademik, penampilan, etnisitas, gender, dan bagaimana untuk mendapatkan seorang pemimpin dengan dengan karakteristik tersebut, ataupun berdasarkan keturunan atau tidak mempermasalahkan keturunan dengan syarat beberapa kriteria yang ditulis diatas. Ideologi memiliki banyak arti argumen atau pemikiran persuasi untuk menentang pikiran yang bertolak belakang. Ideologi sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, dari aspek pendidikan, ekonomi,

kesejahteraan, kesehatan, dll. Adaanya gagasan dalam sebuah

ideologi berawal dari ide/gagasan masyarakat yang mereka ingin wujudkan. Berbicara tentang masalah ekonomi tidak lepas dari kekayaan dan bagaimana mereka mendistribusikan kekayaan yang mereka punya, serta apakah masyarakat diberik kebebasan yang luas dalam menghasilkan kekayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Deliarnov. 2006 : 16 bahwa manusia adalah makhluk rasional yang didorong kepentingan pribadi (berproduksi, membeli, dan menjual) baik barang ataupun jasa. Apakah kekayaan manusia dapat dibatasi dalam mencarinya, serta batas seperti apa

yang dilakukan? Bagaimana kekayaan dapat disistribusikan dan bagaimana dalam mewujudkannya? Berbicara tentang masyarakat kita dapat melihat jelas perbedaan ada masyarakat kaya, menengah, miskin, mayoritas dan minoritas. Dan bagaimana hubungan diantara mereka? Serta bagaimana mengatur hal tersebut(mereka yang memiliki ideologi tentunya dapat memiliki kekuasaan untuk melakukannya). Ideologi berkaitan dengan hal penting dalam kehidupan sosial, baik mengajukan program atau menentang program. Ideologi terdapat ide dan gagasan bagaimana masyarakat hidup dan diatur oleh norma yang dipahami dan hal tersebut menjadi landasan untuk menyusun masyarakat itu sendiri. Dilain sudut ide tersebut dijadikan hal dasar dalam menanggapi serta dapat menentang apabila muncul kebijakan yang dianggap tidak pas atau merugikan dari tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Ideologi mencoba melakukan untuk merasionalisasikan kepentingan kelompok sehingga dalam hal kepentingan tersebut sangat beralasan dan berdasar serta layak di pertahankan. Dengan adanya ide serta harapan keinginan dalam tatanan masyarakat luas hal tersebut dijadikan landasan yang kuat dalam melindungi serta memperjuangkan masyarakat yang menjadi hal utama. Ideologi memiliki sifat normatif, etis, dan moral. Dapat disimpulkan dari tulisan diatas bahwa ideologi merupakan sebuah tatanan masyarakat yang didalamnya berisi sistem politik, budaya, dan ekonomi yang diimpikan oleh kelompok, individu, golongan masyarakat yang sangat luas dan besar menjadi dasar dalam bertindak.

Partai politik

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam bernegara, serta yang menjadi alur wajib adalah politik di sebuah negara dalam menjalankan demokrasi. Ada pendapat bahwa parpol merupakan penggerak utama dalam sistem demokrasi. Dengan adanya parpol masyarakat dapat merasakan kepemilikan terhadap negara dan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiarjo: 404) mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Sedangkan menurut Sigmund Neumann (Miriam Budiarjo:404) mengatakan bahwa Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik memberikan definisi sebagai berikut; Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dapat kita simpulkan parpol merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan berlandaskan kepercayaan terhadap nilai tentang masyarakat yang mereka impikan. Serta organisasi dipergunakan mewujudkan harapan atau keinginan masyarakat dengan cara yang sah dengan mendapatkan kekuasaan

dibidang politik. Dengan memiliki kekuasaan masyarakat dapat dengan mudah mewujudkan impian masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Sosialisasi politik

Merupakan pembentukan sikap dan orientasi politik oleh para anggota masyarakat. Melewati proses sosialisasi politik masyarakat akan mengetahui arti yang sangat penting dari politik beserta instumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya politik politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif, mengutamakan konsensus dibanding menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, mempunyai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi.

Rekrutmen politik

Merupakan sebuah seleksi dan pemilihan pengangkatan kelompok atau individu untuk melakukan peran dalam sistem politik pada umumnya dan khususnya pada pemerintahan. Parpol diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin atau perseorangan yang memiliki kemampuan menjalankan tugas secara baik dengan jabatan yang mereka miliki. Dalam proses demokrasi individu diberikan kesempatan untuk mencapai perolehan tertentu, dalam mendapatkan hal yang diinginkan serta bagaimana individu tersebut mencapai hal dengan aturan undan-undang yang diciptakan. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginnya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.

Partisipasi politik

Sosialisasi dan komunikasi politik membawa pada kecerahan atau keterbukaan rasional pada masyarakat dalam kegiatan politik. Fungsi ini diharapkan dapat memunculkan kesadaran asyrakat terkait nasib mereka di masa depan. Nasip yang mereka akan hadapi dimasa depan merupakan bergantung pada tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dari pemrintah pusat ataupun pemerintah daerah dari pihak tersebut kebijakan yang ditunjukkan untuk mengalokasi nilai akan di buat dan dipersembahkan untuk masyarakat banyak. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpinan pemerintah.

Pemandu kepentingan

Kepentingan dalam setiap masyarakat sangat berbeda bahkan sering kali bertentangan, anantara kemauan untuk memperoleh keuntungan yang baik dalam mendapatkan barang dan jasa contohnya serta yang lainnya tetapi tidak disesuaikan dengan kemampuan. Maka terciptalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Komunikasi politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Banyak rezim di dunia ini yang tidak dapat mempertahankan kekuasaannya yang dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dari situ muncul ketidakpuasan masyarakat kepada penguasanya yang kemudian berujung pada proses penggantian penguasa baik itu cara yang diatur secara konstitusi ataupun dengan kudeta. Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki. Partai politik ini berada diantara pemerintah dan masyarakat, sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini tentunya akan sangat tergantung di pihak mana partai politik berada, apakah di pihak pemerintah ataukah oposisi, tentunya hal ini akan mempengaruhi isi dari pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang diperjuangkan.

Pengendalian konflik

Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Konflik merupakan fenomena yang seringkali tidak bisa dihindari dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Seperti sumber-sumber organisasi, sumber daya manusia, sumber finansial, sumber daya teknologi hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik bukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Maka manajemen konflik bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Hal ini, pihak yang berkonflik berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan pelbagai sumber sekecil dan seefisien mungkin. Dengan penggunaan manajemen konflik proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk

mengendalikan konflik supaya tidak berkembang menjadi konflik destruktif. Di sisi lain, manajemen konflik sebagai aktivitas untuk mengendalikan dan menciptakan konflik konstruktif yang menguntungkan, mengembangkan kreativitas, inovasi dan win-win solution. Dalam pengelolaan konflik ini bisa dilakukan oleh organisasi yang memiliki keahlian dan kemampuan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi non pemerintah maupun masyarakat sipil, bertujuan menciptakan organisasi yang sehat dan menguntungkan. Organisasi yang sehat mampu menyesuaikan diri dan berkembang dalam jangka panjang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internalnya. Sedangkan aktivitas yang dilakukan akan memfokuskan diri pada pencapaian tujuan yang rasional. Sebaliknya yang mengalami konflik berkepanjangan akan menghabiskan energinya untuk saling merusak atau berarti organisasi tidak sehat. Menghindari dari konflik itu justru membuat diri kita tidak mampu melihat manfaat perbedaan pendapat, pemecahan masalah secara kreatif. Sebagai contoh, dalam sistem politik hanya akan mentolelir konflik yang tidak menghancurkan dirinya, melainkan mengendalikan konflik melalui lembaga organisasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan. Organisasi atau kelompok seperti partai politik, organisasi mahasiswa ialah sebagai lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik dengan cara berdialog atau bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berkonflik.

Kontrol politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Baik buruknya kebijakan tentunya sangat bisa diperdebatkan mengingat kebijakan pemerintah tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan. Ketika suatu kebijakan telah dibuat dan dimplementasikanpun perang partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat. Ketika kebijakan itu sudah menjadi keputusan tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang telah direncanakan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah. Faktor pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, karena dibanyak kasus banyak kebijakan itu gagal atau kurang berhasil yang diakibatkan oleh pelaku atau oknum yang mengejar kepentingan pribadinya.

Ideologi dan partai politik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini adalah kemana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang

akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. dengan dasar ideologilah partai itu akan bergerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Berawal dari program kerja inilah kemudian cita-cita untuk mewujudkan atau membentuk masyarakat yang diimpikan akan terwujud. Ideologi digunakan sebagai arah ataupun ukuran kemudian ketika menyikapi persoalan yang ada didalam masyarakat. Di dalam ideologi disitu terkandung hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak hal, ideologi akan menyangkut bagaimana ekonomi dan politik itu akan dijalankan, bagaimana distribusi nilai-nilai itu akan dilakukan. Nilai-nilai disini berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan masyarakat yang akan diciptakan ketika partai tersebut mendapatkan kekuasaan.

Dengan cita-cita tentang masyarakat ideal tadi, hal tersebut dapat digunakan sebagai landasan partai politik untuk menyikapi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (ketika partai tersebut ber oposisi) yang ditujukan kepada masyarakat ketika kebijakan-kebijakan tersebut merugikan ataupun menghambat tercapainya masyarakat yang ideal tadi. Dalam setiap memberikan tanggapan apakah itu kritik ataupun penolakan terhadap suatu kebijakan sebagai pelaksanaan fungsi kontrol partai politik tentunya dapat dirasionalisasikan baik secara akademis dan politis sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang menjadi basis perjuangan ataupun pihak yang berlawanan. Dengan ideologinya masing-masing partai politik itu akan mempunyai identitas yang jelas, hal tersebutlah kemudian yang memudahkan partai politik tersebut dalam mendapatkan massa pendukung. Di sisi yang lain masyarakatpun akan lebih mudah untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan keinginan yang memang memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.

Tabel 1.1

Partai	Ideologi
Golkar	Pancasila
Demokrat	Pancasila
PPP	Islam
PKB	Pancasila
PDI-IP	Pancasila
PAN	Pancasila
PKS	Islam

Sumber: diolah dari berbagai macam sumber

Untuk masa sekarang dengan begitu banyak partai politik yang muncul kita mengalami kebingungan untuk mengidentifikasi penggolongan partai berdasarkan ideologi. Hal yang paling mudah kita bisa melihat dari asas partai yang

secara formal tercantum pada AD/ART partai. Dengan melihat hal tersebutpun kita belum sampai pada analisa yang sifatnya substantif tentang partai tersebut karena pada tataran empiris kadang tidak sejalan antara azas, platform partai dengan perilaku elit, pemilih, serta program-program partai. Sedangkan Asep Nurjaman mengelompokan ideologi partai politik, kedalam empat kategori, yaitu partai yang berideologi Islam, Partai yang berideologi Nasionalis Sekuler, Partai yang berideologi Nasionalis Religius, serta partai yang berideologi Kristen seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 1.2

No	Ideologi	Partai Politik
1.	Islam	Partai bintang reformasi, partai persatuan pembangunan, partai persatuan nahdatlul ummam Indonesia, partai keadilan sejahtera, partai bulan bintang.
2.	Nasionalis Religius	Partai kebangkitan bangsa, partai amnat nasional, partai sarikat Indonesiaia, partai golkar, partai karya peduli bangsa, partai keadilan persatuan indonesia, partai patriot pancasila, partai demokrat, partai persatuan daerah, partai merdeka, partai indonesia baru, partai demokrasi kebangsaan.
3.	Nasionalis Sekuler	PDI-P, PNBK, Partai pelopor, PNI marhaenisme, Partai demokrat penegak Indonesia, partai buruh sosial demokrat.
4.	Kristen	Partai Damai Sejahtera

Sumber Asep Nurjaman, *ejournal.umm.ac.id*

Memang untuk penggolongan sangat debatable karena penggolongan-penggolongan akan berbeda ketika menggunakan indikator yang berbeda pula. Ideologi Islam di situ digunakan ketika suatu partai menggunakan istilah-istilah Islam dalam AD/ART-nya, sedangkan untuk nasionalisme religius disitu walaupun tidak menyebutkan Islam secara eksplisit tetapi dalam AD/ART mencantumkan nilai-nilai agama dan moral. Sedangkan Nasionalisme, ketika AD/ART tidak menyebutkan istilah-istilah Islam, moral, nilai-nilai ajaran agama. Dan terakhir Kristen ketika di dalam AD/ARTnya secara eksplisit mencantumkan nilai-nilai, istilah atau ajaran-ajaran dalam agama kristen.

Partai politik dan pemilu

Salah satu instrumen paling penting dalam pemilu adalah dengan adanya peserta pemilu, yaitu partai politik. Partai politiklah yang berkompetisi baik partai politik itu sendiri ataupun anggota partai yang mencalonkan menjadi anggota legislatif ataupun menjadi presiden. Pemilu merupakan arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lain untuk mendapatkan kekuasaan yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada tataran teoritis partai politik bersaing dengan ideologi yang kemudian termanistasikan ke dalam kebijakan partai dan selanjutnya munculah program partai. Program-program tersebutlah yang kemudian menjadi aksi nyata yang langsung dapat diamati dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Partai politik hadir dengan menawarkan berbagai program yang diyakini akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa ataupun akan memperjuangkan sesuatu bagi masyarakat banyak sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Dengan hadirnya begitu banyak partai politik tentunya membuat pemilu semakin meriah, baik itu partai lama (partai yang telah pemilu sebelumnya) ataupun partai baru (termasuk partai pecahan partai lama). Persaingan antar partai politik akan semakin sengit dalam mendapatkan suara, apalagi dengan munculnya partai baru yang tentunya mempunyai warna baru dan harapan baru. Partai politik hadir dengan asa yang dibawa, yaitu ingin memperjuangkan atau mewujudkan masyarakat yang didam-idamkan. Yaitu dengan menawarkan banyak harapan, bagaimana cara mewujudkan, tipe masyarakat yang mana akan menjadi basis perjuangan; apakah petani, buruh, atau nelayan, masyarakat yang ada dipertanian atau pedesaan dan sebagainya. Seperti fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen, bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Dengan hadirnya sistem pemilihan langsung baik untuk tingkat nasional ataupun di daerah maka fungsi rekrutmen yang dilakukan partai politik semakin penting peranannya. Penting disini adalah dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik maka akan muncul calon-calon pemimpin yang memang telah teruji (kemampuan teoritis atau konsep dan praktek) baik itu kerja-kerja organisasi ataupun dalam bermasyarakat. Partai politik dapat dikatakan sebagai tempat mencetak kader yang dapat dijadikan calon-calon pemimpin baik di tingkat pusat ataupun di daerah. Ketika negara kita sederhanakan menjadi organisasi, peran pemimpin merupakan hal yang pokok, dari pemimpin inilah kemudian akan muncul keputusan-keputusan yang diarahkan untuk tercapai cita-cita organisasi (negara). Kader-kader dari partai inilah yang kemudian menjadikan cerminan dari partai politik terkait dengan ideologi, yang diharapkan kelak ketika menjadi seorang pemimpin dapat membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan ideologi partai, tidak bersebrangan dengan ideologi partai. Tentunya kebijakan ini tidak sebatas kebijakan pemerintah pusat melalui presiden, tetapi juga gubernur, walikota ataupun bupati. Seiring dengan otonomi daerah dimana kemudian daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan besarnya kewenangan yang bergitu besar maka hal menjadi kesempatan yang bagus untuk partai politik membuat kebijakan sebagai bentuk

manifestasi ideologi partai di daerah melalui kepala daerah. Dengan semakin banyak partai politik hal ini membawa implikasi bahwa masyarakat semakin bingung untuk memilih partai mana yang dipercaya dapat memperjuangkan atau mewujudkan kepentingannya. Dengan semakin banyak partai politik hal ini seakan menutup kemungkinan untuk salah satu partai memenangkan pemilu secara mutlak. Sehingga dengan kondisi seperti ini maka, kemungkinan untuk melakukan kerjasama atau koalisi dalam kemenangan calon eksekutif baik pusat maupun daerah. Secara teoritis dalam melakukan koalisi partai politik akan melihat siapa yang akan diajak berkoalisi? Tentunya partai politik yang sepeham (seideologi). Karena dengan begitu maka akan lebih mudah untuk bekerjasama ketika banyak kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Sebagai contoh partai yang berideologi Islam dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan kebijakan akan berkoalisi dengan partai yang berideologi liberal dengan nilai kebebasan yang menjadi landasan kebijakan partai, tentunya hal ini akan sangat sulit menyamakan persepsi tentang banyak hal. Banyak hal disini seperti; bagaimana sistem ekonomi, sosial ini akan dijalankan, bagaimana seharusnya pemerintah dalam melakukan fungsi terkait hal tersebut? Fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia perbedaan partai politik sudah semakin kabur. hal ini mungkin disebabkan tidak ada perbedaan yang ekstrim antar partai politik. Terjadi pergeseran secara ideologi yaitu mengkombinasikan nasionalis dan Islam yang kemudian muncul istilah Nasionalis-Religius. Selain itu dipengaruhi basis masa yang akan dibidik, sebagai contoh; walaupun berhaluan nasionalis tetapi ingin membidik golongan islam untuk mendulang suara, sehingga hal ini kemudian memaksa untuk membuat organisasi keagamaan (Islam) atau semacamnya yang terafiliasi dengan partai tersebut. Koalisi partai-partai politik yang dilakukan sifatnya jangka pendek, yaitu bagaimana mendapatkan kekuasaan. Yang seharusnya arah koalisi partai politik dilandasi oleh ideologi partai yang kemudian menjadi identitas yang termanifestasi pada program partai tetapi yang terjadi adalah partai apapun dimungkinkan melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan. Yang terjadi adalah bukan persoalan jika kemudian bekerjasama dengan partai yang berbeda ideologi, asalkan hal itu mempermudah untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari koalisi partai politik, dimana tidak ada keseragaman koalisi baik ditingkat pusat maupun di daerah. Ditingkat pusat, Partai demokrat berkoalisi dengan PPP, PAN, PKB, PKS, dan Golkar yang berseberangan dengan oposisi yang terdiri dari PDI-P, Gerindra, Hanura. Tetapi di daerah terjadi koalisi yang beragam, kalau memang koalisi kemudian tidak berdasarkan ideologi tetapi berdasarkan komando kepemimpinan partai pusat itu masih menunjukkan arah kebijakan elit partai. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada keberagaman terkait koalisi antara pusat daerah, pada tingkat pusat antara PDI-P dan Demokrat tetapi di daerah sangat dimungkinkan untuk terjadi koalisi antar kedua partai tersebut. Kenderungan koalisi lebih pada kombinasi antara partai Islam dan Nasionalis dan hal tersebut tidak seragam, bisa berkoalisi dengan partai Islam atau Nasionalis manapun asalkan koalisi tersebut memberi keuntungan yang cepat.

Kesimpulan

Dengan dimungkinkannya untuk pemilihan langsung baik presiden, Gubernur, Walikota dan bupati perpolitikan Indonesia semakin meriah, masyarakat semakin

sering terlibat dengan kegiatan politik dalam arti sempit (pemilu). Ideologi lebih terkesampingkan oleh peran ketokohan, ketokohan kemudian yang menjadi pertimbangan masyarakat umum ketika menentukan pilihannya bukan pada ideologi apa yang dipegangnya hal ini merupakan konsekuensi dari pemilihan langsung. Ketokohanlah yang kemudian menjadi incaran atau yang dikejar ideologi melalui partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan politik. Politik pencitraanlah kemudian yang menonjol dalam tarik menarik mencari dukungan dalam pemilu. Dengan peran media yang begitu besar baik media cetak maupun elektronik. Di satu sisi masyarakat lebih mudah mengenali sang kandidat melalui apa yang dilihat melalui media, tetapi disisi yang lain masyarakat luas mudah terkecoh dengan pencitraan yang mereka bangun.

Kondisi seperti inilah yang kemudian sering menyebabkan kekecewaan di masyarakat dikemudian hari. Disisi lain terjadi pergeseran peran ideologi, ideologi yang seharusnya dijadikan landasan partai politik beserta kadernya dalam melakukan kerja-kerja politik yang menyangkut banyak hal tetapi ideologi dijadikan konten pencitraan yang acapkali manipulatif. Ideologi kemudian hanya menjadi aksesoris dari partai politik, ideologi dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek elit-elit partai politik dalam mengejar kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya elit partai politik berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Ideologi tidak bisa mengikat perilaku elit-elit partai politik, perilaku elit kadang tidak mencerminkan ideologi partai politik, baik dari tindakan asusila, korupsi, atau kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai ketika ia menjadi pejabat negara. Tentunya fenomena menyulitkan untuk mendapatkan calon yang tepat, bukan karena keterbatasan informasi tetapi karena banyaknya informasi yang ditawarkan tokoh dengan pencitraannya melalui media yang ada, diharapkan kita lebih hati-hati dalam menentukan pilihan (dalam pemilu).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik; Mencangkup berbagai teori dan konsep ilmu politik yang komprehensif. Jakarta. Erlangga.
- Firmansyah. 2011, Mengelola partai politik, Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi. Jakarta, Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Nurjaman, Asep, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/126>
- Surbakti, Ramlan. 1992, Memahami lebih dasar Ilmu Politik, Jakarta. Grasindo.
- Syam, Firdaus, 2007. Pemikiran dalam Politik Barat. Jakarta. Bumi Aksara
- Syaukani, H et all, 2002. Otonomi Daerah dalam negara kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar ilmu politik
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Pemilihan umum